EMPAT PILAR DASAR DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERKUALITAS PERSPEKTIF ISLAM

Ilin Solehudin¹, Andri Nurjaman², Nurul Alamin³

¹SMAN 10 Kota Bandung, Indonesia

²SMP Yayasan Atika Sunda Kota Bandung, Indonesia

³Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Indonesia

E-mail: ilinsolehudin10@gmail.com, andrienurjaman99@gmail.com, nurulalamin02@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintahan yang bersih dan berkualitas menjadi kunci utama dalam menghadirkan tatanan pemerintahan yang baik bagi suatu daerah, sehingga dapat melahirkan keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat. Sistem pemerintahan yang bersih dan berkualitas tersebut, tampaknya masih menjadi sebuah harapan dan masih jauh dari kenyataan. Salah satu buktinya masih banyak ditemukan Kepala Daerah di Provinsi Jawa Barat atau pemimpin institusi pemerintahan lainnya yang terlibat melakukan tindakan penyelewengan kekuasaan seperti halnya pidana korupsi. Oleh karena itu, penulis melakukan studi dan penelitian untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkualitas. Pada artikel ini, metode penelitian yang digunakan adalah library research atau studi pustaka. Berdasarkan hasil yang diperoleh, penulis menegaskan bahwa ada empat pilar dasar internal untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkualitas, yaitu sipat: Shiddiq, Tabligh, Amanah dan Fathonah yang disingkat menjadi STAF. Empat sifat ini dapat membentuk pribadi baik seseorang dalam berbagai situasi dan posisi, termasuk bagi seorang Kepala Daerah, Birokrat, Abdi Negara dan posisi jabatan penting lainnya. Empat pilar dasar tersebut selain untuk personal seorang pimpinan institusi pemerintahan, konsep STAF tersebut juga bisa diterapkan dalam sistem dan manajemen pengelolaan pemerintahan. Maka, dengan memiliki empat pilar dasar tersebut akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berkualitas.

Kata kunci: Empat Pilar, Pemerintahan, Bersih, Berkualitas

ABSTRACT

Clean and quality government is the main key in presenting a good governance order for a region, so that it can give birth to justice, prosperity and happiness for the community. This clean and quality government system still seems to be a hope and is still far from reality. One of the proofs is that there are still many Regional Heads in West Java Province or leaders of other government institutions who are involved in committing acts of abuse of power such as corruption crimes. Therefore, the authors conduct studies and research to create a clean and quality government. In this scientific writing, the research method used is library research or literature study. Based on the results obtained, the author emphasizes that there are four basic internal pillars for creating a clean and quality government, namely attitude: Shiddiq, Tabligh, Amanah and Fathonah which is shortened to STAF. These four characteristics can shape a person's good personality in various situations and positions, including for a Regional Head, Bureaucrat, Servant of the State and other important positions. The four basic pillars aside from being a personal leader of a government institution, the STAF concept can also be applied to government systems and management. So, having these four basic pillars will encourage the realization of clean and quality governance.

Keywords: Four Pillars, Governance, Clean, Quality

PENDAHULUAN

Politik atau dalam Islam disebut dengan *siyasa* adalah hubungan manusia dengan lingkup masyarakat, dan manusia adalah subjek utama dalam kehidupan perpolitikan tersebut (Nambo, 2005). Politik sebagai bagian dari ajaran Islam telah meletakkan dasar dan prinsip dalam

menjalankan kehidupan politik, diantaranya harus dijalankan dengan berkeadilan, musyawarah, jujur dan amanah (Adnan & Usman, 2022).

Namun dalam realita di lapangan, dasar dan prinsip yang telah diajarkan dalam Islam banyak yang tidak diaplikasikan dalam menjalankan roda politik. Dalam artian banyak terjadi penyimpangan, seperti maraknya tindak pidana korupsi oleh para elite politik. Hal inilah yang kemudian mencitrakan politik sebagai tempat yang kotor dan negatif.

Fenomena sikap dan perilaku kurang baik juga terlihat di beberapa layanan publik di berbagai institusi pemerintahan. Bentuk penyimpangan tersebut bisa terlihat dengan banyaknya perilaku mempersulit, superior, pengabaian, perlakuan khusus, sebagai calo, korupsi, suap-menyuap dan perilaku menyimpang lainnya (Hasniati, 2013).

Solusi untuk menekan banyaknya berbagai kasus penyimpangan di dunia politik, khususnya di berbagai institusi atau lembaga pemerintahan mutlak dilakukan. Islam telah menyodorkan solusi, diantaranya adalah dengan meneladani empat sifat Nabi (*shiddiq, tabligh, amanah* dan *fathonah*, yang selanjutnya disingkat dengan STAF) dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkualitas.

Empat sifat tersebut harus ditiru oleh seluruh umat manusia, terlebih lagi untuk para pemimpin yang mengurus urusan pemerintahan dan kenegaraan. Kepemimpinan sendiri merupakan aktifitas untuk mempengaruhi banyak orang yang diarahkan untuk mencapai sesuatu (Kayo, 2005). Sedangkan dalam Islam, kepemimpinan identik dengan kata *khalifah* yang artinya pengganti atau wakil (Sakdiah, 2016).

Dalam mewujudkan cita-cita pemerintahan yang bersih dan berkualitas, para pemimpin mutlak untuk mempunyai ahlak yang mulia. Ajaran moral atau ahlak yang mulia ini merupakan inti dari ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Ajaran moral tersebut telah diamalkan dan dicontohkan langsung oleh Baginda Nabi Muhammad Saw. Oleh karena itu, umat manusia khususnya umat Islam harus mencontoh keteladanan sifat dan pribadi Nabi dalam menjalankan berbagai kehidupan di dunia, termasuk dalam mengelola pemerintahan yang pada saat ini banyak terjadi penyelewengan. Dengan membumikan sifat-sifat Nabi dalam menjalankan roda pemerintahan, maka cita-cita dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkualitas akan bisa dicapai (Alamsyah, 2017). Empat sifat Nabi di atas, selain untuk personal seorang pemimpin institusi pemerintahan, juga bisa diterapkan dalam sistem dan manajemen dalam mengelola institusi atau lembaga pemerintahan.

Adapun ulasan literatur ataupun kajian pustaka mengenai empat sifat Nabi sebagai empat pilar dasar dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkualitas, diantaranya; *pertama* artikel ilmiah dengan judul "*Karakteristik Kepemimpinan dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah*" yang ditulis oleh Sakdiah dalam Jurnal Al-Bayan Volume 22 Nomor 33 tahun 2016. Artikel ini berisi mengenai karakter kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. serta urgensi nilai-nilai sifat utama Nabi Muhammad sebagai karakter kepemimpinan. Tentu artikel ini berbeda

dengan artikel yang akan penulis tulis, yaitu berfokus pada kajian empat pilar dasar dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkualitas.

Kedua, artikel dengan judul “*Membumikan Sifat Rasul dalam Kepemimpinan Pendidikan: Memposisikan Nabi Muhammad SAW sebagai Panutan dalam Kepemimpinan Pendidikan*” yang ditulis oleh Yosep Aspat Alamsyah dalam Jurnal Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam Volume 7 Nomor 2 tahun 2017. Artikel ini berisi mengenai mempraktekkan sifat-sifat Nabi dalam praktek kepemimpinan pendidikan. Jelas artikel tersebut berbeda dengan artikel yang ditulis oleh penulis dengan fokus kajian empat pilar dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkualitas.

Ketiga, artikel dengan judul “*Optimalisasi Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP): Meneladani Sifat Rasulullah Saw.*” yang ditulis oleh Wisnu Widya Asmara dalam Jurnal Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Volume 6 Nomor 2 tahun 2022. Artikel ini berisi mengenai sifat-sifat Rasul yang digunakan sebagai teladan dalam optimalisasi kode etik APIP. Artikel ini lebih spesifik pada kode etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sedangkan tulisan yang sedang digarap oleh penulis lebih bersifat global yaitu empat pilar dasar dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkualitas.

Dari latar belakang di atas, permasalahan atau rumusan masalah yang akan dibahas yaitu bagaimana implementasi empat pilar dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkualitas. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan implementasi empat pilar tersebut dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkualitas.

Uraian lengkap ini dimaksudkan sebagai solusi dan sumber informasi kepada semua pemimpin dan jajaran di berbagai institusi atau lembaga pemerintahan dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat sebuah artikel dengan judul “*Empat Pilar Dasar dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berkualitas*”.

METODOLOGI PENELITIAN

Artikel ini memposisikan empat sifat Nabi sebagai empat pilar dasar dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkualitas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka atau *library research*. Penelitian pustaka adalah ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku dan dokumen lainnya yang mendeskripsikan teori dan informasi lalu mengorganisasikan penelitian terdahulu ke dalam topik yang dibutuhkan (Creswell, n.d.).

Penelitian pustaka merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif-deskriptif. Sumber data dalam penyusunan artikel ini adalah berasal dari data sekunder yaitu dari berbagai referensi seperti kitab, buku, penelitian terdahulu, jurnal dan situs dalam internet. Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan teknik dokumentasi yaitu kumpulan tulisan atau catatan dalam jumlah yang signifikan dari bahan tertulis. Teknis analisis data menggunakan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam sebagai Solusi Terbaik

Islam adalah sebuah agama yang memiliki ajaran universal dan memuat berbagai pedoman bagi segala sesuatu. Pedoman tersebut tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Risalah Islam lahir untuk memberikan sebuah konsep bagi semua golongan umat manusia dan berbagai aspek kehidupan. Al-Qur'an dan Al-hadits adalah pedoman dan pegangan umat manusia yang bersifat mutlak dan final (Wasehudin, 2018).

Menjalankan ajaran-ajaran Islam adalah sesuatu yang sangat *urgent* dalam menjalani kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara, karena Islam sendiri telah mengajarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan segala bidang kehidupan, termasuk dalam mengelola sistem pemerintahan agar melahirkan kebermamfaatan dan kebaikan (Hasniati, 2013). Umat Islam harus meyakini bahwa ajaran dan syariat yang dibawakan oleh Rasulullah Muhammad Saw. adalah ajaran yang akan menuntun umat manusia pada karakter dan etika yang baik dan mulia. Karakter dan etika tersebut tercermin dari sifat-sifat Rasulullah Saw. sendiri. Maka dalam ajaran Islam, karakter dan etika adalah inti ajarannya. Termasuk dalam menjalani pekerjaan, haruslah memakai etika yang baik menurut ajaran Islam dan Negara. Maka, etika dan pekerjaan ini tidak bisa dipisahkan.

Dalam fakta historis, Nabi Muhammad SAW telah berhasil membentuk masyarakat yang Islami sekaligus telah berhasil menciptakan pemerintahan yang bersih dan berkualitas sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Nabi Muhammad SAW menggunakan proses evolusi sosio-kultural, artinya Nabi Muhammad tidak langsung secara cepat mengubah Mekah, namun dilakukan secara bertahap, baik di Makkah selama 13 tahun ataupun di Madinah selama 10 tahun. Setelahnya hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad Saw. melakukan ijtihad politik dalam mempersatukan semua elemen masyarakat melalui piagam Madinah. Piagam inilah yang menurut Ibnu Hisyam sebagai Undang-Undang dasar Negara dan pemerintahan Islam yang pertama. Di Madinah tersebut, Nabi Muhammad SAW mempunyai posisi selain sebagai pemimpin agama juga sebagai pemimpin Negara. Pada perkembangan selanjutnya Nabi Muhammad Saw. berhasil merebut kembali Makkah dengan *Fathul Makkahnya* pada tahun kedelapan Hijriyah (Sakdiah, 2016).

Menurut Robert N Bellah menyatakan bahwa masyarakat Arab dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW telah melahirkan sebuah kemajuan dalam kompleksitas sosial dan politik (Bellah, 2000). Sedangkan menurut Philip K Hitti mengatakan bahwa dari komunitas keagamaan di Madinah kemudian lahir sebagai Negara Islam yang dibangun oleh kaum *anshor* dan kaum *muhajirin*, oleh karena itu, Nabi Muhamad menjalankan sebagai pemegang fungsi keagamaan sekaligus pemegang otoritas kepala Negara (Hitti, 1970).

Empat Pilar Dasar dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berkualitas Perspektif Islam

Empat pilar dasar yang dimaksud adalah empat sifat Nabi Muhammad SAW dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkualitas. Rasulullah Muhammad SAW memiliki banyak sifat yang terpuji, diantara sifat wajib bagi seorang utusan Allah ada empat yaitu; *shiddiq*, *tabligh*, *amanah* dan *fathonah*. Keempat sifat tersebut merupakan cerminan dari kandungan isi dalam Al-Qur'an, sehingga pantas Rasulullah disebut dengan Al-Qur'an berjalan. Keempat sifat tersebut patut untuk dijadikan teladan bagi umat manusia dalam menjalani berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkualitas. (Asmara & Hamidah, 2022)

A. Shiddiq

Nabi Muhammad Saw. banyak mempunyai sifat yang terpuji, salah satu sifat wajib bagi Nabi Muhammad Saw. yang *pertama* adalah *shiddiq* yaitu benar atau bersikap jujur baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan, baik kepada orang lain maupun kepada Tuhan (Abdullah & Mardian, 2021), serta mustahil berbuat berdusta (Khan, 2002) .

Dalam bersikap jujur ini, Nabi Muhammad Saw. sendiri menyerukan untuk selalu bersikap dan memiliki sifat jujur. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang artinya sebagai berikut:

“Jamin untukku enam perkara dari kalian, aku menjamin untuk kalian surga, enam perkara ini adalah: bila berbicara jujurlah, tepatilah janji apabila kalian berjanji, apabila kalian dipercayai, tunaikanlah amanah, jagalah kemaluan kalian (dari kemaksiatan), palinglah pandangan kalian (dari segala yang diharamkan melihatnya) dan tahanlah tangan kalian (dari mengambil yang haram)”.

Dalam hadits lain pun, Nabi Muhammad Saw. menekankan kepada umatnya agar selalu berbuat jujur dan menjauhi berbohong dalam berbicara. Adapun hadits diatas jika diterapkan dalam kondisi pemerintahan di Indonesia khususnya di Jawa Barat hari ini, maka pemangku kebijakan sebagai seorang pimpinan dan sistem serta manajemen pemerintah haruslah menjalankan dan mengelola fungsi pemerintahan yang bersih dan berkualitas dengan melakukan transparansi, akuntabilitas dan tanggungjawab atas semua institusi pemerintahan (Sakdiah, 2016).

Dengan sifat *shiddiq* tersebut, Nabi Muhammad Saw. berhasil menjadi seorang pemimpin yang sangat dipercaya oleh rakyatnya. Nabi Muhammad Saw. tidak hanya berbicara dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan dan keteladanan. Perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad Saw. selalu konsisten. Oleh karena itu, Islam telah memberikan solusi terbaik terhadap permasalahan dalam permasalahan pemerintahan hari ini dengan maraknya kasus tindak korupsi, penyelewengan kekuasaan dan lain-lain, solusinya yaitu dengan meneladani sifat Nabi yang pertama yaitu *shiddiq* yang harus selalu berkata dan berbuat jujur dalam memimpin, mengurus dan mengelola roda pemerintahan.

Sifat *shiddiq* ini akan berimplikasi yang sangat signifikan dalam menjalankan sebuah pekerjaan, termasuk dalam mengelola sistem pemerintahan. Maka, menerapkan sifat *shiddiq* ini akan melahirkan sifat jujur dan menjauhi segala bentuk perbuatan manipulasi dan penyembunyian

kebenaran. Kejujuran inilah yang kemudian membentuk integritas seseorang sebagai pemimpin dan manajemen serta sistem dalam mengelola pemerintahan. Integritas yang bersamaan dengan sifat *shiddiq* ini nantinya akan mampu menciptakan keadilan.

Pemimpin dalam institusi pemerintah yang memiliki sifat jujur pasti akan menjalankan tugasnya dengan baik, sebaliknya pemimpin yang berdusta tidak mungkin menjalankan tugasnya dengan baik. Memiliki pemimpin yang jujur akan membuat nyaman bekerja para bawahannya, apalagi masyarakat. Manajemen dan sistem pemerintahan juga harus dikelola dengan jujur, karena pola pemerintahan yang sistem dan manajemennya memiliki banyak kedustaan akan berakibat buruk kepada institusi atau lembaga pemerintahan itu sendiri. Oleh karena itu, penting sekali menciptakan budaya, suasana kerja, sistem dan manajemen yang sehat dalam sebuah lembaga apalagi lembaga atau institusi pemerintah (Mozumder, 2018).

Lembaga atau institusi yang dipimpin oleh pemimpin yang jujur akan berpengaruh juga pada mudahnya menjalin kerjasama atau bermitra dengan lembaga-lembaga lain. Kemitraan dan kerjasama antar lembaga atau institusi akan berjalan dengan mudah dalam mengejar tujuan lembaga tersebut dengan kejujuran dan saling percaya. Kepemimpinan yang diselimuti kebohongan dan fitnah akan merusak iklim lembaga itu sendiri dan merusak kepercayaan baik lembaga lain ataupun masyarakat.

Pemimpin yang loyal harus didasari pada kejujuran, maka hal ini akan mengikuti aturan konstitusi dan menghindari perbuatan inkonstitusional. Pemimpin yang baik dan jujur akan memproduksi kepemimpinannya dalam sebuah produk kebijakan yang diambil, bisa berupa petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis yang akan mengikat semua orang dalam sebuah institusi. Pengambilan keputusan harus berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan, itulah prosedur kerja di institusi yang menjalankan dan mengamalkan sifat *shiddiq*-nya Nabi Muhammad SAW dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkualitas.

Masyarakat sendiri membutuhkan pemerintah yang jujur. Kejujuran yang dibutuhkan masyarakat adalah kejujuran yang betul-betul refleksi dari hati nurani yang bersih dan jernih, bukan kejujuran yang dibuat-buat apalagi hanya pencitraan. Jika pemerintah sebagai pelayan masyarakat dalam menjalankan tugasnya penuh dengan kebohongan, maka akan melahirkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, pemimpin yang memiliki sifat *shiddiq* akan mampu mempertanggungjawabkan semua tugas-tugasnya, baik kepada Allah SWT maupun kepada masyarakat dan pribadinya sendiri (Musyirifin, 2020).

Sifat *shiddiq* atau jujur juga penting dalam mengelola pemerintahan yang tidak hanya ditekankan kepada seorang pimpinan institusi pemerintah. Namun juga sistem dan manajemen yang dibuat haruslah berdasarkan pada kejujuran. Prinsip kejujuran tersebut harus menjadi budaya dalam sistem pengelolaan pemerintah dengan sikap saling percaya dan tolong menolong. Maka jika sistem dan manajemen dalam mengelola pemerintahan tersebut berlandaskan kejujuran, hal ini akan menciptakan *clean and good government* yang telah dicita-citakan tersebut akan tercapai.

Sistem dan manajemen dalam pengelolaan pemerintah yang jujur akan melahirkan *clean and good government* tadi selanjutnya akan menciptakan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Transparansi berarti terbukanya berbagai informasi kepada masyarakat. Sedangkan akuntabilitas adalah kapasitas sebuah institusi pemerintahan dalam mencapai visi dan misinya dari mulai perencanaan sampai dengan evaluasi. Lalu partisipasi berarti masyarakat diajak untuk mengawasi kinerja dalam sebuah institusi pemerintah.

Apalagi dalam mengelola dana pemerintah, hal ini harus sangat berlandaskan integritas yang tinggi, memiliki kejujuran dan terbukanya sistem yang transparan. Maka kejujuran dan transparansi adalah kata kunci utama dalam pengelolaan sistem pemerintahan khususnya dalam pengelolaan keuangan Negara dengan baik.

B. Tabligh

Nabi Muhammad Saw. adalah penyampai risalah Tuhan yang telah disampaikan kepada umatnya (Nawawi, 1993). Oleh karena itu, salah satu istilah yang disandang oleh Nabi Muhammad SAW adalah *mundhir* (pemberi peringatan) (Ridho, 1983). Istilah *mundhir* ini kemudian bertugas untuk menyampaikan risalah Allah yang disebut dengan istilah *Tabligh*.

Nabi Muhammad Saw. diutus serta diangkat menjadi pemimpin yang bertugas menyampaikan wahyu dan memuat berbagai informasi mengenai syariat dan ajaran Islam, dalam hal ini Nabi Muhammad Saw. berhasil menjadi seorang manajerial yang handal.

Tabligh sendiri merupakan sifat wajib bagi rasul yang *kedua* dan memiliki arti menyampaikan. Rasul tidak akan mengajarkan sesuatu kecuali sudah terlebih dahulu melakukannya. Sifat ini juga berarti Rasul tidak pernah menyembunyikan suatu informasi untuk kepentingan umat dan agamanya. Bahkan Rasulullah tidak pernah menyembunyikan satu informasi pun untuk kepentingan pribadinya (Sakdiah, 2016).

Dalam mengelola pemerintahan, sikap *tabligh* ini atau tidak menyembunyikan informasi atau dalam perkembangan hari ini disebut dengan transparansi (keterbukaan) sangatlah penting dilaksanakan oleh para pemangku kebijakan di lingkungan pemerintahan. *Tabligh* adalah sebuah keahlian yang mesti dimiliki seorang pemimpin dalam menyampaikan dan transparan tanpa mengubah isi pesan. Karena dengan adanya transparansi ini, masyarakat bisa mengetahui berbagai hal, termasuk kinerja para pemimpin, apakah memihak rakyat atau sebaliknya. Maka hemat penulis, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkualitas, akuntabilitas yang berkaitan dengan keterbukaan atau transparansi mutlak dilakukan oleh para pemimpin di semua instansi pemerintahan.

Ciri dari pemimpin yang menerapkan sifat *tabligh* ini akan selalu memegang terhadap kebenaran dan idealisme dalam perjuangan dengan selalu berkata benar. Sehingga masyarakat dibawah pemimpin yang *tabligh* ini akan mengajak untuk mendengar hati nuraninya, karena hati nurani selalu mengajak kepada kebenaran, bukan pada hawa nafsu. Pemimpin seperti ini juga akan mengajarkan untuk mempelajari dan memahami kebenaran kepada bawahan dan

masyarakatnya. Adapun posisi sifat *tabligh* ini dalam menjalankan roda pemerintahan yang bersih dan berkualitas adalah sebagai kontrol pemimpin terhadap institusi yang dipimpinnya.

Sifat *tabligh* adalah sikap akuntabilitas dalam ajaran Islam yang wajib dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia baik kepada Allah Swt. maupun kepada masyarakat. Prinsip akuntabilitas bagi seorang pemimpin dalam mengelola dan mewujudkan pemerintah yang bersih dan berkualitas berarti memiliki keahlian dalam mempertanggungjawabkan atau untuk menjelaskan dan membuktikan terhadap tugas-tugas yang telah dijalankannya dengan baik. *Tabligh* dalam sistem dan manajemen pengelolaan pemerintah juga berarti menekan prinsip transparansi. Hal ini diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik. Transparansi dalam mengelola sistem pemerintahan sangat penting sekali, karena transparansi tersebut dapat mewujudkan partisipasi dari masyarakat. Transparansi atau keterbukaan informasi adalah hak semua warga negara, dengan adanya transparansi atau keterbukaan tersebut masyarakat akan mengetahui kinerja pemerintahan yang menjadi harapan masyarakat dan masyarakat pun akan mengetahui keberpihakan dari pemerintah.

Jadi sifat *tabligh* Nabi Muhammad Saw. yang hari ini disebut dengan istilah transparansi dalam sistem pengelolaan pemerintahan adalah salah satu indikator untuk mewujudkan *good government* atau dalam artikel ilmiah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkualitas. Jika transparansi ini terus ditingkatkan, maka akan berimplikasi terhadap penegakan hukum dan pemberantasan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Maka sistem dan manajemen pengelolaan pemerintah haruslah transparan, sehingga masyarakat pun akan berpartisipasi dalam mengawasi kinerja pemerintah. Dalam pelayanan publik misalnya, sikap transparansi sangat penting sekali untuk dijadikan prinsip dalam pelayanan publik tersebut. Transparansi atau keterbukaan pelayanan publik dimulai dari transparansi proses penyelenggaraan publik, transparansi pada prosedur dan pelayanan yang mudah dipahami, dan transparansi mengenai kemudahan dalam mengakses berbagai informasi.

C. Amanah

Amanah adalah salah satu sifat wajib yang ketiga bagi seorang Rasul atau utusan Allah Swt. *Amanah* kepada para Nabi atau Rasul tersebut diberikan oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran. *Amanah* tersebut memiliki akar kata yang sama dengan kata “iman” yang mengandung arti keamanan atau ketentraman. *Amanah* sebagai salah satu dari sifat Nabi Muhammad Saw. bermakna dapat dipercaya dan mustahil khianat atau berbuat curang. Hal ini bisa diibaratkan jika seseorang diberikan barang atau jabatan yang dititipkan kepadanya, maka orang tersebut tidak akan membuat seseorang yang memberikannya khawatir atau takut, bahkan akan merasa tenang dan yakin (Departemen Agama Republik Indonesia, 2009). Orang yang memiliki sifat *amanah* berarti orang yang terpercaya dan dapat dipercaya serta tidak melakukan kecurangan.

Maka seseorang dalam memangku jabatan dalam pemerintahan, mutlak memiliki sifat *amanah*, yaitu harus dapat dipercaya dan mampu melahirkan ketentraman serta keamanan bagi

masyarakat melalui berbagai program pemerintahan. Jika semua para pemangku jabatan di pemerintahan memiliki integritas yang baik dengan menerapkan sifat Nabi Muhammad Saw. ini, maka besar kemungkinan angka penyimpangan dan penyalahgunaan jabatan akan menurun serta tindakan korupsi pun akan berkurang.

Pentingnya menanamkan sikap dan sifat *amanah* ini merupakan perintah Allah SWT yang diserukan dalam Al-Qur'an Surah al-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.

Dalam ayat diatas mengandung pengertian yang luas, bahwa setiap muslim memiliki kewajiban untuk menjaga amanah, baik yang berhubungan dengan diri sendiri, orang lain bahkan dengan Allah Swt. (Kattani, 2016). Dalam tafsir al-Azhar menyebutkan bahwa kata “Allah memerintahkan” menunjukan kepada seseorang yang mengurus pemerintahan, memiliki tanggung jawab dan integritas yang baik atas amanah yang diberikan.

Telah disinggung diatas, bahwa lawan kata dari *amanah* adalah *khianat* atau tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, dalam Islam orang yang diberikan amanah haruslah orang yang benar-benar menjaga amanah tersebut. Amanah memerlukan kepercayaan agar lahir suatu kondisi hati yang tenang dan yakin atas suatu amanah yang dititipkan, baik yang bersifat materi ataupun non-materi (Shihab, 2017). Menjaga amanah ini adalah salah satu kewajiban yang telah Allah Swt. perintahkan kepada semua manusia, apalagi menjaga amanah yang diterima oleh pemerintah dari masyarakat. Jika pemerintah mampu menjaga amanah dengan baik, maka akan melahirkan keadilan yang menyeluruh serta tentunya mampu melahirkan pemerintahan yang bersih dan berkualitas. Pemimpin harus senantiasa menjaga amanahnya dengan mengelola pemerintahan dengan baik dan untuk kebaikan masyarakat.

Amanahnya para pemimpin bisa dilihat dari dua bentuk perilaku; yaitu ucapan dan perbuatan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Amanah dalam ucapan berarti semua ucapannya adalah mengandung kebenaran sehingga melahirkan sifat terpercaya dan dipercaya. Pemimpin yang amanah akan berbicara sesuai dengan data dan fakta yang bisa menentramkan masyarakat dan tidak menimbulkan keresahan dan fitnah kepada masyarakat itu sendiri.

Pemimpin dalam pemerintah yang amanah juga akan memiliki tindakan yang benar sesuai dengan peraturan yang berlaku, pemimpin yang amanah juga akan melakukan sesuai dengan janji dalam berbagai ucapannya. Pemimpin yang seperti ini akan menganggap bahwa jabatan yang diembannya adalah titipan dari Allah Swt. Dan masyarakat yang harus bisa dipertanggungjawabkan baik secara vertikal maupun secara horizontal. Ciri dari pemimpin yang amanah adalah memiliki transparansi, akuntabilitas dan akseptabilitas.

Sebaliknya, pemimpin atau pejabat publik yang khianat adalah pemimpin yang tidak dapat dipercaya, ucapannya penuh dengan kebohongan dan tidak bisa memegang kebenaran. Perbuatan pemimpin yang khianat akan bersikap menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan-tujuan pribadinya serta tidak adanya konsistensi dalam janji-janjinya kepada masyarakat. Ciri pemimpin yang seperti ini biasanya adalah melakukan politik uang, manipulasi dan suap. Karakter seorang pemimpin model ini adalah tamak dan rakus. Alhasil, upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkualitas karakter pemimpinnya mutlak dan harus memiliki sifat Nabi Muhammad Saw. yaitu amanah baik dalam perkataan maupun dalam segala perbuatannya. Sifat amanah dalam menjalankan roda pemerintahan ditunjukkan dengan sikap dan rasa tanggungjawab, hormat, sopan santun, dan menunjukkan hasil yang optimal. Implikasi dari pemimpin yang memiliki sifat amanah adalah mengutamakan prinsip keadilan.

Sedangkan amanah dalam sistem dan manajemen pengelolaan pemerintah adalah menjalankan dan mengelola pemerintah dengan baik sesuai dengan petunjuk teknis dan hakikatnya untuk melahirkan kepuasan dan kebermamfaatan bagi masyarakat. Sistem dan manajemen yang dibuat haruslah sesuai dengan ketetapan yang telah disepakati, tidak berlaku curang dan culas, mejauhi berbagai tindakan suap dan korup. Hal ini juga tidak hanya ditekankan bagi seorang pemimpin institusi pemerintan, namun semua elemen yang terlibat didalam sistem pengelolaan roda pemerintah, haruslah memiliki intergritas yang tinggi dalam menjalankannya. Maka dengan memiliki integritas yang tinggi dan budaya amanah dalam sistem pengelolaan akan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkualitas.

D. Fathonah

Nabi Muhammad Saw. diberikan kecerdasan yang luar biasa oleh Allah Swt. baik dalam segi memimpin atau dalam hal lainnya (Hasymi, 1978). Kecerdasan tersebut tidak hanya dipakai untuk menjelaskan risalah dan berdakwah, namun juga dipergunakan untuk memimpin umat manusia. Oleh karena itu, Nabi Muhammad Saw. melakukan cara-cara yang cerdas dalam memberikan petunjuk, nasehat, bimbingan, pendapat dan pandangan untuk umatnya. Dalam kepemimpinan yang cerdas ini, Nabi Muhammad Saw. mengembangkan sistem kapabilitas dalam mengelola pemerintahannya, dalam artian bahwa Nabi Muhammad Saw. menempatkan para sahabatnya dalam posisi tertentu sesuai dengan keahliannya masing-masing. Tentunya hal ini sesuai dengan ajaran Islam, bahwa manusia harus memiliki *skill* atau kemampuan dan kompetensi, sehingga jika seseorang berkeinginan untuk menangani suatu permasalahan, orang tersebut harus mempunyai kompetensi dalam menyelesaikannya.

Kecerdasan dan kepandaian Nabi Muhammad Saw. tersebut disebut dengan istilah *fathonah* yang merupakan sifat wajib bagi Rasul yang *keempat*. *Fathonah* sendiri juga diartikan sebagai kebijaksanaan yang meliputi kepintaran dan kecerdasan dalam sikap dan ilmu, memiliki dedikasi, berdisiplin, mampu membedakan yang baik dan buruk serta mampu dalam memutuskan suatu persoalan dengan solusi yang terbaik.

Pemimpin yang memiliki kecerdasan mampu melihat dengan cepat akar masalah yang sedang terjadi dan tindakan apa yang akan diambil. Seorang pemimpin harus memahami bentuk tugas yang diembannya dan harus mampu memberikan keputusan yang cepat, tepat dan benar (Sakdiah, 2016). Menurut Marshall G. Hodgson yang dikutip oleh Nurkholis Madjid menyebutkan bahwa kesuksesan kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. dalam memimpin umat manusia adalah dengan membebaskannya dari kebodohan dan kegelapan dengan landasan cinta kasih (Khan, 2002). Maka kecerdasan yang dilandasi dengan spiritual yang kuat adalah modal utama dalam mengelola pemerintahan yang bersih dan berkualitas. Kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional harus tertanam di dalam jiwa dan karakter para pemangku jabatan di berbagai instansi pemerintahan saat ini. Agar mampu menghilangkan segala bentuk penyelewengan dalam mengelola institusi pemerintah. Seorang pemimpin yang memiliki kecerdasan berarti memiliki intelektualitas yang baik, hal ini bisa dilihat dari visi, misi, rencana program kerja dan strategi pelaksanaan yang disusunnya (Alamsyah, 2017).

Adapun sifat *fathonah* dalam sistem dan manajemen pengelolaan pemerintah adalah melakukan kebijakan sistem dan manajemen yang efektif dan efisien dalam merancang dan menjalankan program bagi semua elemen didalam sistem pengelolaan. Kecerdasan pengelolaan akan membuat masyarakat senang, karena budaya dalam sistem yang efektif tersebut, artinya sistem yang dibuat dengan sederhana dan tidak menyulitkan masyarakat.

SIMPULAN

Empat sifat Nabi Muhammad SAW diatas, merupakan ajaran moral yang bersifat normatif dan dogmatis. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkualitas, harus mengimplementasikan empat sifat Nabi Muhammad Saw. tersebut sebagai empat pilar dasar dalam menjalankan dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkualitas. Bahkan keempat pilar dasar tersebut harus diterapkan ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut sudah jauh-jauh hari dicontohkan langsung oleh Nabi Muhamad Saw. selama 23 tahun di dalam masa kerasulan. Ajaran-ajaran moral diatas juga bisa diadopsi menjadi sebuah peraturan perundang-undangan untuk kemajuan negara-bangsa dan agama di Indonesia khususnya di Jawa Barat.

SARAN

Rekomendasi yang dibuat berdasarkan hasil penelitian ini terbagi menjadi dua; *Pertama*, untuk seorang pimpinan diberbagai institusi pemerintahan harus bisa mengimplementasikan keempat sifat Nabi Muhammad Saw. di atas sebagai empat pilar dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkualitas. *Kedua* bagi sistem dan manajemen pengelolaan pemerintah juga harus dibuat sesuai dengan karakter dari empat sifat Nabi Muhammad Saw. tersebut. Maka jika pimpinan dan sistem serta manajemen pengelolaan pemerintah sudah diaplikasikan atau terimplementasi dalam pengelolaan pemerintah akan melahirkan pemerintahan yang bersih dan berkualitas sesuai dengan harapan dan cita-cita dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. G., & Mardian, S. (2021). Telaah Literatur Kode Etik Auditor: *Perspektif Maqashid Syariah Versi Imam Abu Zahrah*. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(1).
- Adnan, M., & Usman, M. I. (2022). *Etika Politik dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tahlili QS. Al-Nisa/4: 58)*. Pappasang: *Jurnal Studi Al-Qur'an-Hadis Dan Pemikiran Islam*, 4(2).
- Alamsyah, Y. A. (2017). *Membumikan Sifat Rasul dalam Kepemimpinan Pendidikan: Memposisikan Nabi Muhammad SAW sebagai Panutan dalam Kepemimpinan Pendidikan*. Al-Idarah: *Jurnal Kepemimpinan Islam*, 7(2).
- Asmara, W. W., & Hamidah. (2022). *Optimalisasi Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP): Meneladani Sifat Rasulullah Saw*. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 6(2), 271–291. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i2.5233>
- Bellah, R. N. (2000). *Beyond Belief terjemahan Rudy Harisyah Alam*. Jakarta: Paramadina.
- Creswell, J. (n.d.). *Research Design (Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches)*.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2009). *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, Dan Berpolitik*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur'an.
- Hasniati, H. (2013). *Sikap dan Perilaku Birokrat Garis-Depan Dalam Pelayanan Publik Ditinjau Dari Perspektif Syariat Islam*. *Al-Fikr*, 17(1), 190–203.
- Hasymi, A. (1978). *Nabi Muhammad Sebagai Panglima Perang*. Jakarta: Mutiara.
- Hitti, P. K. . (1970). *History of The Arabs*. London: McMillan.
- Kattani, A. H. al. (2016). *Tafsir Al-Munir*. Jakarta: Gema Insani.
- Kayo, R. . K. P. (2005). *Kepemimpinan Islam dan Dakwah*. Jakarta: Amzah.
- Khan, A. W. (2002). *Rasulullah Di Mata Sarjana Barat*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Mozumder, N. (2018). *A Multilevel Trustbased Model of Ethical Public Leadership*.
- Musyirifin, Z. (2020). Implementasi Sifat-Sifat Rasulullah dalam Konseling Behavioral. *Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 11(2), 151–159. <https://doi.org/10.15548/jbki.v11i2.2088>
- Nambo, A. B. (2005). Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah Dari Sistem Politik). *Mimbar*, 2(15), 262–263.
- Nawawi, H. (1993). *Kepemimpinan Menurut Islam*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ridho, M. R. (1983). *Wahyu Illahi kepada Nabi Muhammad*. Bandung: Pustaka Jaya.
- Sakdiah, S. (2016). *Karakteristik Kepemimpinan dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah*. *Jurnal Al-Bayan*, 22(33), 29–49.
- Shihab, M. Q. (2017). *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Wasehudin, W. (2018). *Perspektif Al-Qur'an dan Undang-Undang Tentang Guru Profesional*. *TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education*, 5(1).